

CAPAIAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (1)

1. Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
 - a. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
 - b. RPP tentang Pengamanan SF dan Alkes (pencabutan PP 72/1998)
 - c. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat & Makanan; Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik sebagai revisi Perka Nomor 39 Tahun 2017 ttg Yanblik.
 - d. Pencabutan beberapa Perka BPOM terkait dg regulasi yang tumpang tindih/disharmonis, antara lain pencabutan Perka HK.05.3.1.3322 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang beredar dan Iklan agar sejalan dengan PP No. 109 Tahun 2012
 - e. Perka BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia
 - f. Perka BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemasukan Obat dan Makanan

CAPAIAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2)

2. Regulasi terkait perkuatan Kelembagaan:
 - a. Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM
 - b. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
 - c. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM
 - d. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM
3. Sinergi kebijakan dan regulasi dalam dokumen perencanaan dalam sistem KARINA (Kerangka Regulasi Nasional)
4. Pengembangan aplikasi sistem monitoring dan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan